

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin, Firmansyah, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Mahkamah Konstitusi, 2005.

_____. *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, (Jakarta: KRHN, 2004)

Asshiddiqie, Jimly, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

_____. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____. *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, The Biografy Institute, Jakarta, 2007.

Budiharjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Ekatjahjana, Widodo, *Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.

Harjono, *Transformasi dan Demokrasi*, Sekertariat Jenderal dan kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.

HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Tiori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2013.

Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014.

Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008.

Palguna, I Dewa Gede, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*, Setjen dan Kepanitraan MK RI, Jakarta, 2008.

Roestandi, Achmad, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK, 2005.

Siahaan, Maruarar, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup*, Sekertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Thaib, Dahlan, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

B. Karya Ilmiah

Hakim, Lukman, *Kedudukan Komisi Negara di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Kosariza , “Pengaturan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara Dan Penyelesaiannya Oleh Mahkamah Konstitusi”, Hasil Penelitian Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2018.

Susi Dwi Harijanti, dkk, *Interaksi Konsitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Kebijakan Negara FH Universitas Padjajaran, Bandung, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi.

D. Jurnal

Cornelis Lay, "State Auxiliary Agencies", *Jurnal Hukum JENTERA*, Edisi April 2006.

Kosariza, Netty, Meri Yarni, "Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi", Volume 4, Nomor 2, Desember 2020.

Mansur Marzuki, "Telaah Kritis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara", *Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia*, Volume IV No. 1 Juni 2011.

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Yuridika, Volume No. 5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.

E. Website

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5>, diakses pada 15 November 2020 pukul 19.27 WIB.